

KERENTANAN MASYARAKAT LOKAL PEGUNUNGAN MURIA MENGHADAPI BENCANA

Mochamad Widjanarko
Universitas Muria Kudus

Abstrak

Kawasan Pegunungan Muria di Kabupaten Kudus dan Jepara menurut peta kerawanan bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Penelitian ini bertujuan menemukan ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat terhadap bencana di pegunungan Muria. Pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, pengamatan terlibat dan diskusi kelompok terarah dengan fokus pada pihak yang berkaitan langsung atas pengelolaan pegunungan Muria seperti masyarakat, tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di tiga kabupaten yaitu Kudus, Pati dan Jepara. Semua data lapangan dikumpulkan, diverifikasi dan dianalisis deskriptif. Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa pemahaman aparat pemerintah tentang penanggulangan bencana dan peraturan organiknya, masih rendah. Bencana hanya diterjemahkan pada proses tanggap darurat sedangkan rasionalisasi upaya pengurangan risiko bencana belum kelihatan. Kedua, pemahaman umum sebagian besar masyarakat, bencana adalah takdir dari Tuhan. Pernyataan bahwa bencana merupakan takdir Tuhan, tidak menjadi dasar yang kuat dalam mengenali ancaman dan kerentanan, karena pengetahuan lokal yang merupakan kapasitas masyarakat menunjukkan hal yang berbeda. Kemampuan masyarakat mengenali risiko melalui tanda alam merupakan bentuk kapasitas masyarakat menghadapi bencana. Proses menemukan risiko tersebut juga merupakan bentuk penyesuaian masyarakat atas kondisi alam yang ada atau dikenal dengan '*ilmu titen*' baik masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan maupun pesisir.

Kata kunci: pengetahuan lokal, masyarakat Muria

Abstract

The Muria mountain area in Kudus and Jepara based on disaster vulnerability map of National Disaster Management Agency (BNPB) is an area with a high level of vulnerability to disaster. This study aims to identify threats, vulnerabilities and capacities of the community in dealing with disaster in Muria mountain area. The data collecting is through interviews, participatory observation and focus group discussions by focusing on those who are directly involved in the Muria mountain management like public figure, community leaders, village government, the Local Government Unit (SKPD) in three regencies, Kudus, Pati and Jepara. The data is collected, verified and analyzed descriptively. The results of observation and interview indicate that the understanding of government officers on disaster management and its regulation is low. Their understanding on disaster is at the level of emergency response process only. Whereas, the rationalization of disaster risk reduction is not yet understood. Secondly, general conception of most people, disaster is from God. The statement that the disaster is God's will can not be a strong foundation in identifying threats and vulnerabilities because local knowledge is the capacity of communities show different things. The community's ability to recognize the natural signs of risk is the community capacity in dealing with disaster. The process of identifying risk is also the community adaptation of natural condition known as '*ilmu titen*' both for high land and coastal area community.

Keywords: *local knowledge, Muria community*

PENDAHULUAN

Kawasan Gunung Muria terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir yang melingkupi tiga kabupaten, yaitu kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Penggunaan lahan di dataran tinggi di Kawasan Gunung Muria adalah sebagai kawasan hutan lindung dan hutan

produksi. Sebagian lagi berfungsi sebagai kebun, hutan rakyat, tanah ladang, persawahan dan pemukiman. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan *catchment area* sejak pemerintahan Hindia Belanda (1873 Staatsblad No. 215).

Berdasarkan data Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun Provinsi Jawa Tengah (2007), keadaan tutupan lahan di kawasan tersebut mengalami degradasi dari tahun ke tahun. Total luas hutan kawasan Muria adalah 69.812,08 ha, terdiri dari hutan di wilayah Jepara 21.516,406 Ha (17.954 Ha atau 83% gundul, termasuk 3,962.66 ha Hutan Lindung). Di wilayah Kabupaten Pati 47.338 Ha (81% atau 38.344 ha rusak dan termasuk 1,425.95 ha Hutan Lindung) dan 2.377,57 ha. Sementara di wilayah Kabupaten Kudus 2.377,57 ha (83% atau 1.940 ha rusak dan termasuk 53.93 ha Hutan Lindung (YLSKAR, 2006).

Kawasan Muria di Kabupaten Kudus dan Jepara menurut peta kerawanan bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, untuk kawasan yang masuk kabupaten Pati dikategorikan dalam tingkat kerawanan sedang. Tiga (3) jenis ancaman banjir ini berpengaruh besar terhadap risiko bencana banjir di Kawasan Muria, seperti yang terjadi pada tahun 2006, ketika terjadi curah hujan yang tinggi kawasan berisiko di kawasan Muria terjadi bencana banjir baik bandang, luapan maupun banjir pantai. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pati tepatnya pada bulan Maret 2010, terjadi bencana banjir di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Tayu (19 Desa), Kecamatan Dukuhseti (4 Desa), Kecamatan Gabus (3 Desa), Kecamatan Tambakromo (1 Desa) dan Kecamatan Kayen (1 Desa). Kejadian bencana banjir di Kecamatan Tayu mengakibatkan 8.992 rumah yang dihuni 35.668 jiwa dan 506 hektar tambak bandeng dan udang, terendam banjir. Kerugian material mencapai 21 miliar rupiah (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0603/24/nas05.htm>).

Bersamaan dengan bencana banjir di wilayah tersebut, bencana banjir juga terjadi di Desa Pasokan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati akibat jebolnya bendungan Kali Puncel yang mengakibatkan tergenangnya jalan yang menghubungkan Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan Desa Ujungwatu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara (<http://www.pkpu.or.id/news/musibah-banjir-bandang-di-pati-jawa-tengah>).

Di Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog yang merupakan desa yang terletak hulu sungai juga mengalami banjir bandang dan mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang hilang. Sedangkan di Kabupaten Jepara banjir bandang juga mengancam dan merusakkan sejumlah infrastruktur jembatan dan jalan desa seperti yang terjadi di Desa Sumosari Kecamatan Batealit, Desa Damarwulan dan Desa tempur Kecamatan Keling pada bulan pertengahan bulan Februari tahun 2006 dan 2007.

Sementara itu, abrasi dan intrusi telah terjadi di Kecamatan Kedung, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling di Kabupaten Jepara; serta Kecamatan Tayu, Dukuhseti di Kabupaten Pati. Kasus Abrasi paling nyata ditunjukkan pada kasus hilangnya tambak dan pemukiman di Desa Bulak Kecamatan Kedung

Jepara tahun 1970-an berubah menjadi laut karena abrasi dan intrusi dari 100 m sampai 5 km.

Kerusakan ekosistem Muria sudah berlangsung demikian lama akan tetapi belum tampak adanya upaya penyelesaian yang berarti, berbagai upaya yang dijalankan oleh berbagai pihak terlihat masih kurang efektif. Salah satu penyebab ketidakefektifan ini adalah lemahnya kolaborasi antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Muria. Tercatat terdapat beberapa pihak yang telah mempunyai peran dalam pengelolaan Muria adalah Perhutani sebagai pengelola hutan lindung, Dinas Kehutanan mengelola hutan rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Universitas dan beberapa LSM serta organisasi masyarakat lainnya.

Masing-masing pihak yang berwenang dan berkepentingan belum mampu bersinergi dengan baik dan masih berjalan sendiri-sendiri. Di lain pihak masyarakat pedesaan di sekitar kawasan masih sangat rendah partisipasinya dalam melestarikan lingkungan hidup. Meskipun dijumpai beberapa inisiatif dari beberapa pihak, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat, akan tetapi masih bersifat sporadis dan tidak terintegrasi satu dengan yang lain.

Dari karakter bencana yang berpengaruh pada masyarakat di kawasan Muria tersebut diatas, penelitian akan menemukan ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat terhadap bencana di pegunungan Muria dan menekankan bagaimana pengaruh kebijakan pengelolaan kawasan Muria pada pengurangan risiko bencana ? Pertanyaan tersebut merupakan rumusan tersebut menjadi dasar penelitian kerentanan masyarakat lokal Pegunungan Muria dalam pengurangan risiko bencana.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian yang ingin menemukan ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat terhadap bencana di pegunungan Muria dan mengetahui pengaruh kebijakan pengelolaan kawasan Muria pada pengurangan risiko bencana, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, pengamatan terlibat dan diskusi kelompok terarah dengan fokus pada pihak yang berkaitan langsung atas pengelolaan pegunungan Muria

Semua data lapangan pada tahap pertama akan dikumpulkan, diverifikasi dan dianalisis. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Selain itu, juga dilakukan analisis triangulasi yaitu analisis atas sejumlah responden tertentu dengan melakukan *check* dan *recheck* dari berbagai sumber.

HASIL PENELITIAN

Kata Pak ir di Desa C," bencana adalah musibah, selain memang nasib atau takdir, yang menguatirkan di daerah saya, hujan yang disertai angin kencang dapat menyebabkan tanah longsor mnyebabkan kerugian material,".

Hal ini mirip dengan pernyataan Bapak Chm di desa S, " bencana ya musibah dari Tuhan dan biasa buat kami, setiap tahun dipastikan terjadi banjir, yang penting masih bisa makan dan bekerja seperti biasa."

Bencana adalah takdir dari Tuhan merupakan pemahaman umum sebagian besar masyarakat. Tidak hanya itu, bentuk kepasrahan yang muncul dari masyarakat tidak menunjukkan ketiadaan kapasitas yang dimiliki. Kemampuan menemukan tanda alam dan analisa turunnya daya dukung lingkungan tidak bisa diabaikan sebagai bentuk ketiadaan pengetahuan lokal yang melekat dalam pemikiran mereka dalam memandang lingkungan sekitarnya. Sehingga pernyataan bahwa banjir merupakan takdir Tuhan, tidak menjadi dasar yang kuat dalam mengenali ancaman dan kerentanan, karena pengetahuan lokal yang merupakan kapasitas masyarakat menunjukkan hal yang berbeda. Dimana pengetahuan tersebut hilang atau sengaja dihilangkan karena persoalan struktur dan kebijakan yang tidak mendukung masyarakat dalam mengelola kawasan yang merupakan tempat hidupnya sebagai sebuah ekosistem yang utuh.

Dalam menemukan ancaman, masyarakat telah mengenal dengan baik kondisi alam yang berpengaruh terhadap sumber penghidupannya. Perubahan lingkungan sekitar dan penyebab atau pemicu bencana yang berdampak pada kehidupannya pun telah mereka kenali. Namun antara pengetahuan dan kemampuan untuk bertindak, menjadi tidak berimbang sehingga tidak mampu mengeliminir risiko bencana yang diterima oleh masyarakat itu sendiri.

Salah satu pernyataan Ketua kelompok tani di desa C, Bapak I , " agar tidak longsor, kami menanam halaman yang miring dengan pepohonan keras. Kemudian, menanam pohon Ramayana di perkebunan kopi sebagai pelindung lahan dan tanaman kopi dan biasanya masyarakat desa ini membangun rumah dengan cakar ayam yang kuat di daerah yang miring.

Di tambahkan oleh S di Desa Blings, "Tanda-tanda yang biasanya saya ketahui kalau mau banjir, hujan besar berhari-hari, berturut-turut, semut-semut keluar dari sarangnya, dan burung terik muncul. Di tambahkan oleh Prt , "kalau ada *luwe* (baca: kaki seribu) naik ke pohon".

Coping masyarakat dalam pengurangan risiko bencana pun belum menjadi jawaban pasti dalam pengurangan risiko bencana pada hulu, tengah maupun hilir kawasan Muria. Mengenali ancaman kerentanan dan kemampuan menghadapi bencana pun menjadi berbeda-beda. Belum ada intervensi yang bisa dikatakan "baik" dalam memperkuat masyarakat menghadapi risiko bencana jika prasyarat utama tidak dipersiapkan dengan baik.

Mekanisme kerja masyarakat dalam penanggulangan bencana atau dikenal sebagai *coping mechanism* adalah cara yang digunakan individu dalam menyelesaikan masalah, mengatasi perubahan yang terjadi atas situasi yang mengancam baik secara kognitif maupun perilaku. *Coping mechanism* masyarakat yang ditemukan dalam penelitian ini berdasarkan kondisi kawasan dan ancaman bencana bisa digolongkan menjadi 2 yaitu : *coping mechanism* kawasan atas. dan *coping mechanism* kawasan bawah atau pantai

Upaya pengurangan resiko lainnya dilakukan dengan normalisasi sungai dan saluran air lainnya, baik dengan tenaga manusia atau menggunakan mesin keruk (*bekhoe*). Upaya ini biasanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten karena membutuhkan biaya besar. Di Desa Batukali ada adaptasi dengan beternak kerbau dan bebek karena lebih tahan terhadap dingin dan basah sehingga bisa bertahan pada waktu banjir. Masyarakat Batukali juga menanam kangkung dan padi secara bergantian sesuai kondisi lahan sehingga ketika banjir masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tetap bisa panen sepanjang tahun.

Ini yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di Desa Btkl, Bapak I,” Untuk mengurangi banjir di desa ini, perlu adanya normalisasi sungai yakni pengerukan sungai yang dilakukan rutin, bukan hanya saat ada proyek saja.”

Tabel 1: Upaya Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana

ANCAMAN	KERENTANAN	COPING
BANJIR	Secara geologis (struktur tanah) berada pada kawasan rawan banjir	pondasi rumah ditinggikan
	Struktural : pengabaian keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan	rumah ditingkat
	Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam penanggulangan bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bab III Pasal 8) belum dipenuhi	perabotan rumah diletakkan di tempat yang lebih tinggi
	keterbatasan ekonomi untuk melakukan upaya PRB	menyediakan perahu penyelamat
	keterbatasan akses : transportasi dan informasi	membangun sistem peringatan dini berbasis pengetahuan lokal
		normalisasi sungai dan saluran air lainnya
		memelihara ternak yang tahan terhadap kondisi banjir : kerbau, bebek
		menanam jenis tanaman yang tahan terhadap kondisi banjir seperti kangkung
TANAH LONGSOR	Secara geologis (struktur tanah) berada pada kawasan rawan banjir	memperbaiki kondisi lingkungan (konservasi) : reboisasi
	Struktural : pengabaian keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan	Fisik : membangun tanggul tebing, atap rumah didag/dicor semen
	Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam penanggulangan bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bab III Pasal 8) belum dipenuhi	Mencegah kerusakan lingkungan dengan menyusun aturan lokal yang melarang penebangan pohon di lokasi rawan bencana
	keterbatasan ekonomi untuk melakukan upaya PRB	sistem peringatan dini

Sumber : Hasil Wawancara, Peneliti, 2010

DISKUSI

Risiko bencana sebagai dampak buruk salah kelola dan salah urus tersebut menyebabkan kelompok masyarakat selalu menjadi korban ketika diperhadapkan pada frekwensi bencana yang terus meningkat pada beberapa tahun terakhir ini. Banjir, kekeringan dan tanah longsor menjadi ancaman bencana yang dominan bagi masyarakat baik pada kawasan hutan, kota, bantaran sungai dan muara laut. Risiko bencana tersebut dirasakan oleh semua kalangan masyarakat dengan tidak memandang strata dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat. Dengan ketiadaan kapasitas dalam menghadapi bencana tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara negara belum mampu menemukan risiko yang dihadapi masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk menghadapi risiko bencana yang merupakan dampak dari salah kelola dan salah urus dalam pengelolaan kawasan Muria.

Tidak hanya itu, menemukan ancaman dan kerentanan pun masih jauh dari harapan untuk mampu mengintegrasikan dalam perencanaan pembangunan yang memiliki perspektif pengurangan risiko bencana. Ketidaktahuan atas substansi kebijakan penanggulangan bencana dan pengelolaan kawasan Muria masih belum utuh, sehingga kesan minim koordinasi masih bisa dikatakan sebagai “bencana ikutan” setelah bencana terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kawasan Pegunungan Muria memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah ekosistem pegunungan lainnya. Tidak hanya karakteristik lingkungannya namun karakter ancamannya juga berbeda-beda. Pengelolaan dan kepengurusan wilayah Pegunungan Muria tidak hanya melibatkan tiga (3) pemerintah kabupaten tetapi juga PERUM PERHUTANI Unit I KPH Pati juga memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan kawasan Pegunungan Muria. Perbedaan kepengurusan dalam pengelolaan Pegunungan Muria dipengaruhi oleh pola pengelolaan kawasan yang memicu besaran ancaman bencana.

Kemampuan masyarakat mengenali risiko melalui tanda alam merupakan bentuk kapasitas masyarakat menghadapi bencana. Proses menemukan risiko tersebut juga merupakan bentuk penyesuaian masyarakat atas kondisi alam yang ada atau dikenal dengan “ilmu titen” (bahasa Jawa) baik masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan maupun pesisir. Perbedaan tempat tinggal tersebut mempengaruhi cara pandang dan model penyesuaian (adaptasi) atas risiko bencana. Pengaruh kepemimpinan dan ketergantungan atas kondisi alam sangat mempengaruhi daya penyesuaian masyarakat atas risiko bencana. Dan kondisi penyesuaian tersebut menjadi sulit ketika ketidakpastian cuaca dan atau cuaca ekstrim mempengaruhi ketepatan tanda alam yang telah mereka miliki sebelumnya serta memberikan dampak buruk bagi sumber penghidupannya. Ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian cuaca dan atau cuaca ekstrim tersebut memicu kerentanan baru khususnya kelompok masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan untuk bertahan hidup maupun mendapatkan akses informasi cuaca yang berpengaruh pada sumber penghidupannya.

Saran yang merupakan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Pemerintah Desa perlu melibatkan masyarakat dalam menemukan risiko bencana, ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat/desa serta melibatkan masyarakat dalam menyusun peta rawan bencana; 2. Pemerintah kabupaten perlu bersinergi dengan PERUM PERHUTANI Unit I KPH Pati dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi atas pengelolaan kawasan Pegunungan Muria dengan melibatkan masyarakat karena telah memiliki analisa risiko bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian & Afferanger, 2006, *Hidup Akrab Dengan Bencana, sebuah tinjauan global tentang inisiatif-inisiatif pengurangan bencana*.
- Budimanto, Arif dan Rudito, Bambang, 2003. *Metode & Teknik Pengelolaan Community Development*: ICSD.
- Harper & Erica, 2009, *International Law and Standards Applicable In Natural Disaster Situations*: International Development Law Organization.
- Heijkman, A. 2006. *CBDRM Training*: Koalisi Muria dan ICCO.
- Huma. 2009. *Hutan Desa; Kebijakan dan Mekanisme Kelembagaan* (Seri Panduan Praktis Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan), Jakarta: HUMA.
- Huma. 2009. *Hutan Kemasyarakatan; Kebijakan Dan Mekanisme Kelembagaan* (Seri Panduan Praktis Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan). Jakarta: HUMA,
- IDEA. 2009. *Riset Anggaran Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: IDEA.
- Nugroho, A, 2009. *Tanggapan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan*. Yayasan SHEEP Indonesia.
- Nugroho, A. 2009. *Panduan Pelatihan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat*: Yayasan SHEEP Indonesia.
- Yayasan SHEEP Indonesia. 2009, *Upaya Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pegunungan Risiko Bencana*. Yogyakarta: Yayasan SHEEP Indonesia.
- YLSKAR. 2006. *Laporan Riset Makro Dampak Strategi Pembangunan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Muria, Community Organizer LSKAR Jepara 2005/2006*. Salatiga: YLSKAR.